



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI GURU SEKOLAH DASAR DALAM MELAKSANAKAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

14 November 2024

**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TAHUN 2024**

LATAR BELAKANG

- Menurut data yang dirilis Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), sejak Januari sampai dengan Februari 2024 jumlah kasus kekerasan terhadap anak telah mencapai 1.993. Jumlah tersebut dapat terus meningkat, terutama jika dibandingkan dengan kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2023.
- Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), sepanjang tahun 2023 terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak. Sementara menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari Januari sampai Agustus 2023, terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak.
- Dari jumlah tersebut, 861 kasus terjadi di lingkup satuan pendidikan. Dengan perincian, anak sebagai korban dari kasus kekerasan seksual sebanyak 487 kasus, korban kekerasan fisik dan/atau psikis 236 kasus, korban bullying 87 kasus, korban pemenuhan fasilitas pendidikan 27 kasus, korban kebijakan 24 kasus.
- Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyebutkan bahwa pada tahun 2023, telah terjadi 2.325 kasus kekerasan fisik terhadap anak.

LATAR BELAKANG

- Banyaknya kasus kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan perlu menjadi keprihatinan semua pihak, baik peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, maupun warga satuan pendidikan. Sebab satuan pendidikan merupakan tempat kedua bagi anak dalam menghabiskan waktunya.
- Satuan pendidikan harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak. Apapun bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan harus dapat dicegah dan ditangani dengan baik. Karena kekerasan tersebut bukan saja berdampak buruk bagi anak dalam memperoleh pendidikan yang layak, tetapi juga berdampak buruk pada mental mereka.
- Tidak semua guru kelas memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan khusus di bidang bimbingan dan konseling. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam memberikan layanan BK yang optimal.
- Kemampuan bimbingan konseling bagi guru SD sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh dan untuk memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan belajar yang optimal sesuai dengan potensi dan kebutuhannya.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dinyatakan bahwa pada satu sekolah dasar atau gugus/sejumlah sekolah dasar dapat diangkat guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan:

1. Meningkatkan pemahaman guru sekolah dasar tentang layanan bimbingan konseling.
2. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan guru SD untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman melalui upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.
3. Mendorong inisiatif dan kepedulian guru dalam mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan serta aktif melibatkan orangtua dan masyarakat.
4. Mengembangkan sistem pencegahan dan intervensi dini kekerasan di sekolah

Sasaran:

Guru sekolah dasar di 514 kabupaten/kota sejumlah **1.133 orang** dengan kriteria sebagai berikut.

1. Kualifikasi S1 (diutamakan Psikologi atau BK atau PGSD)
2. Masa Kerja Minimal 5 Tahun
3. Berstatus sebagai ASN atau Non ASN (Guru Tetap Yayasan)
4. Pernah mengikuti pengembangan kompetensi
5. Memiliki pengalaman sebagai fasilitator

MATERI UTAMA

Substansi yang wajib disampaikan untuk Bimtek semua Jenjang

No	Substansi materi	Posisi dalam struktur materi
1	Memahami hak anak dan lingkungan tumbuh kembangnya	Materi Umum: Kebijakan
2	Disiplin Positif	Modul Pencegahan dan Penanganan Perilaku Salah Suai dan Modul Keterampilan Pengasuhan
3	Keadaban Digital	Modul Pemanfaatan Media dan Teknologi dalam Layanan BK

STRUKTUR PROGRAM

No	Materi	JP
A.	UMUM	3
1	Kebijakan peningkatan kompetensi dan peran guru BK pada sekolah dasar	1
2	Kebijakan PPKSP	1
3	Kebijakan Memahami Hak Anak dan Lingkungan Tumbuh Kembangnya	1
B.	POKOK	33
1	Kemampuan Dasar Guru SD (16)	
	a. Penanaman nilai dan karakter melalui pembiasaan pada keragaman peserta didik	1
	b. Peran dan tanggung jawab guru sebagai mentor pada satuan Pendidikan	4
	• Peran guru kelas dalam fungsi bimbingan dan konseling pada sekolah dasar	
	• Pengenalan keragaman karakteristik peserta didik	
	a. Esensi dan konsep dasar pelayanan bimbingan dan konseling pada sekolah dasar	2
	b. Identifikasi dan analisis bentuk perilaku salah suai peserta didik	2
	c. Pencegahan dan penanganan perilaku salah suai peserta didik pada sekolah dasar	6
2	Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (18)	
	a. Asesmen dan perencanaan program pembelajaran yang terintegrasi bimbingan dan konseling	4
	b. Teknik layanan BK pada sekolah dasar	12
	• Layanan BK menggunakan Alat Permainan Edukatif (APE).	
	• Pemanfaatan media dan teknologi dalam layanan BK	
	• Keterampilan pengasuhan bagi orang tua (parenting skill)	
	c. Evaluasi pelaporan dan tindak lanjut bimbingan dan konseling bagi guru sekolah dasar	2
C.	PENUNJANG	4
1	Rencana tindak lanjut	2
2	Tes awal dan tes akhir	2
	TOTAL	40

Jumlah Peserta Bimtek Guru SD per Provinsi

No	Provinsi	Kab/Kota	Peserta Guru	Peserta UPT	Total Peserta
1	ACEH	23	46	1	47
2	BALI	9	18	1	19
3	BANGKA BELITUNG	7	14	1	15
4	BANTEN	8	16	1	17
5	BENGKULU	10	20	1	21
6	D.I. YOGYAKARTA	5	10	1	11
7	DKI JAKARTA	6	12		12
8	GORONTALO	6	12	1	13
9	JAMBI	11	22	1	23
10	JAWA BARAT	27	54	1	55
11	JAWA TENGAH	35	70	1	71
12	JAWA TIMUR	38	86	1	87
13	KALIMANTAN BARAT	14	28	1	29
14	KALIMANTAN SELATAN	13	26	1	27
15	KALIMANTAN TENGAH	14	28	1	29
16	KALIMANTAN TIMUR	10	20	1	21
17	KALIMANTAN UTARA	5	10	1	11
18	KEPULAUAN RIAU	7	14	1	15

No	Provinsi	Kab/Kota	Peserta Guru	Peserta UPT	Total Peserta
19	LAMPUNG	15	30	1	31
20	MALUKU	11	48	1	49
21	MALUKU UTARA	10	30	1	31
22	NUSA TENGGARA BARAT	10	20	1	21
23	NUSA TENGGARA TIMUR	22	44	1	45
24	PAPUA	9	18	1	19
25	PAPUA BARAT	7	21	1	22
26	RIAU	12	24	1	25
27	SULAWESI BARAT	6	12	1	13
28	SULAWESI SELATAN	24	61	1	62
29	SULAWESI TENGAH	13	26	1	27
30	SULAWESI TENGGARA	17	34	1	35
31	SULAWESI UTARA	15	30	1	31
32	SUMATERA BARAT	19	38	1	39
33	SUMATERA SELATAN	17	34	1	35
34	SUMATERA UTARA	33	66	1	67
35	PAPUA TENGAH	8	16		16
36	PAPUA PEGUNUNGAN	8	16		16
37	PAPUA SELATAN	4	8		8
38	PAPUA BARAT DAYA	6	18		18
	TOTAL	514	1,100	33	1,133

REGIONAL DAN WAKTU PELAKSANAAN

No	Lokasi	Wilayah Sasaran	Jumlah Peserta		Jumlah Kelas		Jadwal
1	Medan	Aceh	47	168	4.2	4	19-23 Nov
		Sumatera Utara	67				
		Sumatera Barat	39				
		Kepri	15				
2	Ambon	Papua Barat	22	120	3	3	19-23 Nov
		Maluku	49				
		Maluku Utara	31				
		Papua Barat Daya	18				
3	Yogya	Jawa Tengah	71	160	4	4	28 Nov - 2 Des
		DIY	11				
		Kalbar	29				
		Kaltim	21				
		Jawa Timur	28				
4	Makassar	Sulawesi Selatan	62	240	6.0	6	28 Nov - 2 Des
		Sulawesi Barat	13				
		Gorontalo	13				
		Papua Selatan	8				
		Papua	19				
		Sulawesi Utara	31				
		Sulawesi Tengah	27				
		Sulawesi Tenggara	35				
		Papua Tengah	16				
		Papua Pegunungan	16				

No	Lokasi	Wilayah Sasaran	Jumlah Peserta		Jumlah Kelas		Jadwal
5	Jakarta	Bangka Belitung	15	245	6.1	6	3-7 Dec
		Bengkulu	21				
		Jambi	23				
		Riau	25				
		Kaltara	11				
		Lampung	31				
		Sumatera Selatan	35				
		Jawa Barat	55				
		DKI Jakarta	12				
		Banten	17				
6	Surabaya	Jawa Timur	59	200	5	5	3-7 Dec
		Kalsel	27				
		Kalteng	29				
		NTB	21				
		Bali	19				
		NTT	45				
			1,133	1,133			

Jumlah Narasumber

No	Region	Jumlah Peserta	Jumlah Kelas	Jumlah Narsum	Jadwal
1	Medan	168	4	10	19 s.d. 23 November
2	Ambon	120	3	8	
3	Yogya	160	4	10	28 November s.d. 2 Desember
4	Makassar	240	6	15	
5	Jakarta	245	6	15	3 s.d. 7 Desember
6	Surabaya	200	5	13	
	Total	1.133	28	71	

Keterangan:

Narasumber setiap kelas berjumlah 2 orang dan 1 narasumber media

KEBUTUHAN NARASUMBER

No	Materi	JP	Jumlah
1	Kebijakan	3	1 orang
2	Kemampuan Dasar Guru SD	15	1 orang
3	Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	14	1 orang
4	Pemanfaatan Media dan teknologi dalam Layanan BK	4	1 orang

Catatan: Daftar narasumber dibuat dalam *spreadsheet*

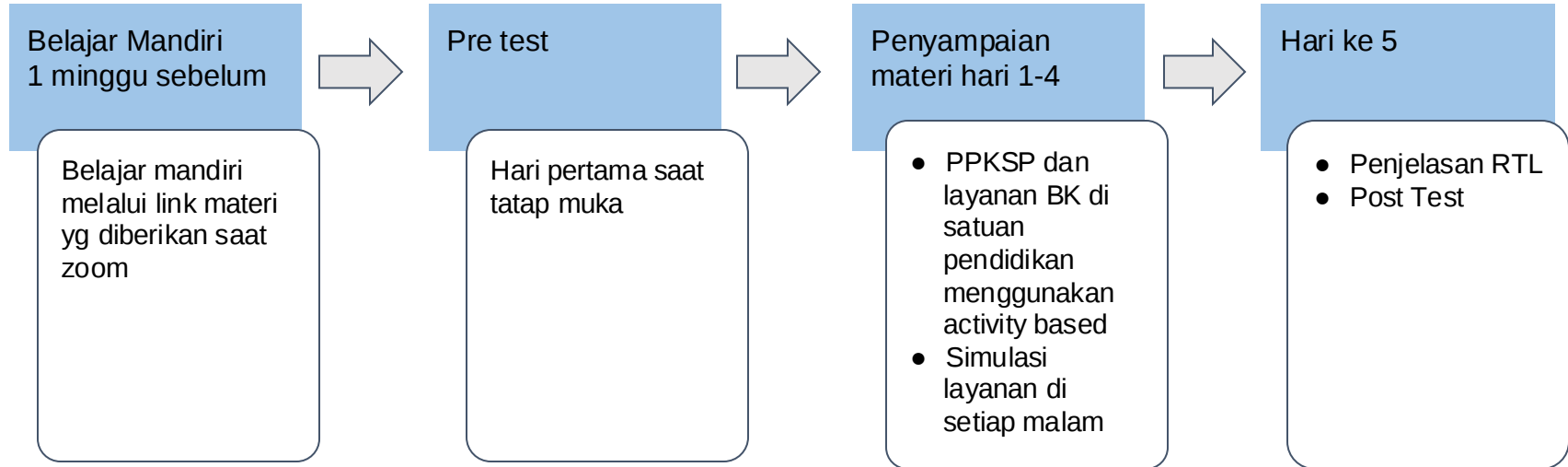
NARASUMBER YANG TELAH MENGIKUTI ORTEK

No.	Jabatan	Jumlah
1	Instruktur Nasional	41
2	Widyaiswara	10
3	Dosen BK	12
4	Praktisi	3
	Jumlah	66

SILABUS MODUL

<https://docs.google.com/document/d/11dpOKuHoK5HSXNv1pbGBMI2iLM6HAqDtMSDL0b8zjFk/edit?tab=t.0>

ALUR PEMBELAJARAN



No	Kegiatan	November					Desember			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4
1	Penyusunan Pedoman									
2	Penyusunan Modul									
3	Penyusunan Soal Pre dan Pos Test									
4	Pemetaan Peserta (Region)									
5	Identifikasi Narasumber									
6	Finalisasi Perangkat (No.1-3)									
7	Penyamaan Persepsi Narsum									
8	Pemanggilan Peserta									
9	Belajar Mandiri									
10	Pelaksanaan Bimtek									
11	Laporan									